

TANTANGAN ORGANIZATION FOR PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPON (OPCW) PADA KONFLIK KONTEMPORER DI SURIAH

THE CHALLENGES OF ORGANIZATION FOR PROHIBITION CHEMICAL WEAPON (OPCW) ON CONTEMPORARY CONFLICT IN SYRIA

Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari

Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260

Telp: (021) 5853753 ext. (252)

E-mail: denik.iswardani@budiluhur.ac.id anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

This research intend to analyze the use of chemical weapons as part of a Weapon of Mass Destruction (WMD) in the contemporary conflict which is a serious threat to the international community. The use of chemical weapons by the Syrian government against its own citizens is a challenge for the Organization for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in carrying out its role to prohibit the use and development of chemical weapons worldwide. OPCW itself formed in 1997 is the implementation of the Chemical Weapons Convention (CWC) 1993. The main problem of this research is how the OPCW's involvement in the prohibition of the use and development of chemical weapons in contemporary conflicts in Syria. This research has a purpose such as to (1) describe the use of chemical weapons in the Syrian conflict, (2) describe the OPCW efforts to ban chemical weapons, (3) analyzing the OPCW efforts to ban chemical weapons in the Syrian conflict. The approach taken in this research is qualitative secondary data. The data were analyzed using the concept of disarmament and the concept of international organizations. The results showed chemical disarmament efforts in Syria by the OPCW is done by sending and destroy chemical weapons belonging to the Syrian government outside Syria. OPCW claims Syria is free from chemical weapons, but still there is the use of chemical weapons by terrorist groups of ISIS and opposition groups that are not recognized by the Syria government. The conclusion in this research is an attempt by the OPCW chemical disarmament in Syria has not fully managed by the concept of disarmament. Some indicators in the concept of disarmament is not done by the OPCW.

Keywords: Chemical weapons, Syrian conflict, OPCW, disarmament.

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk menganalisa penggunaan senjata kimia sebagai bagian dari weapon mass destruction (WMD) dalam konflik yang merupakan ancaman serius terhadap dunia internasional. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri menjadi tantangan untuk Organization for Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) dalam menjalankan perannya untuk melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia di seluruh dunia. OPCW sendiri yang terbentuk pada tahun 1997 merupakan implementasi dari Chemical Weapon Convention (CWC) 1993. Permasalahan utama dari kajian ini yaitu bagaimana keterlibatan OPCW dalam pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia pada konflik kontemporer. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk (1) menggambarkan penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah, (2) menggambarkan upaya OPCW dalam melarang senjata kimia, (3) menganalisa upaya OPCW dalam melarang senjata kimia dalam konflik Suriah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep disarmament (pelucutan senjata) dan konsep organisasi internasional. Hasil kajian menunjukkan upaya pelucutan senjata kimia di Suriah oleh OPCW dilakukan dengan mengirim dan menghancurkan senjata kimia milik pemerintah Suriah di luar Suriah. OPCW mengklaim Suriah sudah terbebas dari senjata kimia namun masih terdapat penggunaan senjata kimia oleh kelompok teroris ISIS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah Suriah. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu upaya pelucutan senjata kimia oleh OPCW di Suriah belum sepenuhnya berhasil berdasarkan konsep pelucutan senjata. Beberapa indikator dalam konsep pelucutan senjata tidak dilakukan oleh OPCW.

Kata kunci: Senjata kimia, konflik Suriah, OPCW, pelucutan senjata.

1. Latar Belakang

Salah satu senjata yang paling ditakuti yaitu senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (Nubika) saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka baik di luar maupun di dalam negeri terutama setelah munculnya berbagai teror biologi dan kimia. Sumber ancaman dari nuklir telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif disertai dengan kemajuan teknologi di bidang kimia khususnya dengan ditemukannya bahan-bahan peledak baru, oleh karena itu ancaman Nubika yang semula dikenal dengan istilah *Nuclear, Biological, Chemical* (NBC) saat ini telah berkembang menjadi *Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear* (CBRN).¹ Salah satu negara yang memiliki senjata kimia yaitu negara Suriah. Secara khusus, serangkaian bencana kekalahan militer Suriah oleh Israel pada tahun 1967, 1973, dan 1982, diikuti oleh melemahnya persatuan Arab melawan Israel setelah perjanjian damai 1979 Mesir-Israel dan dugaan kepemilikan senjata nuklir di Israel, memberikan dorongan bagi Suriah untuk menggunakan strategis *deterrence* terhadap senjata konvensional dan nuklir Israel.²

Seperti senjata nuklir dan senjata biologi, senjata kimia diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal yang memiliki kapasitas mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar dalam satu serangan. *Organization of Prohibition Chemical Weapon* (OPCW) yang berdiri tahun 1997 merupakan entitas terakhir dalam tiga perjanjian global yang mengatur tiga senjata pemusnah massal/*Weapon Mass Destruction* (WMD).³ Berlakunya OPCW mampu memaksa negara untuk tidak memiliki dan mengembangkan senjata kimia salah satunya yaitu Suriah yang baru bergabung dengan OPCW pada tahun 2013, setelah terjadinya penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah dalam konflik.⁴

Namun, ada beberapa kesalahan pada mekanisme pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia oleh OPCW yang meninggalkan masalah. Terdapat adanya beberapa pelaku *non-state* yang menggunakan senjata kimia yaitu ISIS dan Oposisi Suriah. ISIS dilaporkan menggunakan senjata kimia dalam konflik dengan pemberontak Suriah pada 2015. Padahal pada program penghapusan senjata kimia Suriah yang dicapai pada 20 Agustus 2014 berhasil dengan lancar dengan selesainya pengiriman 1.300 ton bahan senjata kimia atau 100% bahan senjata kimia melalui kapal AS kapal Cape Ray ke luar wilayah Suriah menuju Eropa dan Amerika Serikat.⁵ Sekian banyaknya rezim senjata internasional, OPCW yang dianggap mampu memusnahkan senjata kimia yang ada di dunia dan dikarenakan keberhasilannya OPCW mendapat Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2013 atas upaya untuk membebaskan dunia dari senjata mematikan.⁶ Namun dalam perkembangannya justru terdapat aktor *non-state* yang menggunakan senjata kimia seperti kelompok teroris ISIS.⁷ Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini terkait dengan penggunaan senjata pemusnah massal khususnya senjata kimia dalam konflik kontemporer. Berdasarkan latar hak tersebut maka muncul pertanyaan penelitian yaitu “*Bagaimana keterlibatan OPCW dalam pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia pada konflik kontemporer di Suriah?*”

2. Kerangka Pemikiran

Organisasi Internasional

Pembahasan permasalahan ini menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep perlucutan senjata. Organisasi internasional menurut Cheever dan Haviland yaitu :

*“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”.*⁸

Beberapa susunan kerjasama institusi diantara negara dan biasanya persetujuan dasar untuk memberikan beberapa keuntungan semua pihak dengan mengimplementasikan beberapa aktivitas rapat secara berkala. Harold Jacobson membagi organisasi internasional dalam tiga jenis luas yaitu mereka yang peduli dengan keamanan dan perdamaian, dengan perdagangan dan urusan ekonomi lainnya, serta dengan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia.⁹

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. *Pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat.

Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.¹⁰

Menurut Clive Archer juga terdapat beberapa indikator dalam organisasi internasional yaitu keanggotaan, tujuan, dan struktur. Indikator pertama yaitu keanggotaan, sebuah organisasi internasional harus menarik keanggotaannya dari dua atau lebih negara berdaulat, meskipun keanggotaan tidak perlu terbatas pada negara atau perwakilan resmi negara seperti menteri pemerintah. Indikator kedua yaitu tujuan, organisasi ini didirikan dengan tujuan mengejar kepentingan umum anggota. Organisasi akan berakhir jika tidak melakukan tugas mendukung kepentingan satu anggota lebih dari yang lain, tetapi tidak boleh memiliki tujuan yang jelas dengan mengikuti kepentingan hanya satu anggota anggota, terlepas dari keinginan negara lain. Indikator ketiga yaitu struktur organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang bersifat terus menerus dibentuk oleh kesepakatan seperti perjanjian atau dokumen konstituen. Sifat struktur formal dapat bervariasi dari organisasi ke organisasi, tetapi harus terpisah dari kendali salah satu anggota. Struktur otonom inilah yang membedakan sejumlah organisasi internasional dari serangkaian konferensi atau kongres. Jadi organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal secara berkelanjutan dengan dibentuk oleh kesepakatan antara anggota (pemerintah dan / atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan umum dari setiap anggota.

Perlucutan Senjata (Disarmament)

Disarmament dan *arms control* (pengawasan senjata) sering dianggap memiliki arti yang sama. Pada kenyataannya mereka berbeda. Perlucutan senjata bertujuan melikuidasi persenjataan yang ada, sementara pengawasan senjata mencoba untuk mengatur produksi masa depan persenjataan dan mengontrol perlombaan senjata serta penyalahgunaan senjata. Perlucutan berarti penghapusan total semua senjata atau peraturan dan pengendalian hanya beberapa senjata strategis dengan maksud untuk mengurangi tingkat persenjataan atau menghilangkan senjata yang sangat merusak. Perlucutan senjata tidak selalu berarti kontrol senjata. Vernon Van Dyke berpendapat bahwa setiap peraturan atau pembatasan harus dilakukan dengan kekuatan bersenjata dan diperlakukan sebagai ukuran perlucutan senjata.¹¹ Menurut Hans J. Morgenthau, perlucutan senjata adalah pengurangan atau penghapusan senjata tertentu atau seluruh persenjataan untuk tujuan mengakhiri perlombaan senjata.¹² Morgenthau berpendapat bahwa perlucutan senjata, tidak berbeda dari perlombaan persenjataan adalah refleksi dari hubungan kekuasaan antara negara-negara yang bersangkutan. Perlombaan persenjataan memperburuk perebutan kekuasaan, melalui rasa takut itu menghasilkan dan membebani memaksakan, tapi perlucutan memberikan kontribusi terhadap perbaikan situasi politik untuk mengurangi ketegangan politik.

Menurut *United Nation Disarmament, Demobilize, and Reintegration* (UNDDR), konsep *disarmament* merupakan koleksi, dokumentasi, kendali dan pembuangan senjata kecil, amunisi, bahan peledak dan senjata ringan dan berat milik kombatan dan sering juga penduduk sipil termasuk mencakup pengembangan yang bertanggung jawab program manajemen senjata.¹³ Konsep *disarmament* juga dapat dilihat dari paradigma *dekonstruksionisme*, dimana paradigma ini menjelaskan struktur yang telah ada baik itu dalam linguistik, arkeologi atau wilayah lain, memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal tertentu sementara juga membatasi kita dalam cara penting lainnya. Hal ini termasuk ketika negara bekerja sama dengan satu sama lain untuk memberikan tantangan perdamaian dan keamanan internasional melalui perlucutan senjata dan pengawasan senjata. Beberapa perlucutan senjata yang ada memiliki telah menghasilkan beberapa perjanjian yang sangat penting. *Conference of Disarmament* (CD) dan pendahulunya seperti *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (1968), *Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons Convention* (1972), *Chemical Weapons Convention* (1993), dan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (1996) memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal tertentu, struktur yang ada seperti CD juga dapat menjadi faktor yang menghambat dalam menangani beberapa tantangan perdamaian dan keamanan atas agenda internasional saat ini. Konsep *disarmament* ini membuat perbedaan antara ini yang disebut dengan "tradisional" dan yang lain disebut "baru" dalam pendekatan terhadap keamanan multilateral dan

perlucutan senjata. Berikut tiga perbedaan antara pendekatan ini yang menonjol khususnya yaitu *state security vs human security*, proses negosiasi *exclusive vs inclusive*, dan pendekatan birokratis *vs flexible*.¹⁴

3. Penggunaan Senjata Kimia pada Konflik Kontemporer di Suriah

Sebelum membahas lebih dalam soal penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer, maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa terminologi konflik sangat beragam penyebutannya, ada yang menyebut konflik sebagai konflik internal, perang kecil, peperangan baru, konflik etnis, dan lain sebagainya. Pemahaman dan terminologi yang berbeda sesungguhnya menggambarkan bahwa konflik dalam praktiknya merupakan lanjutan perang. Dari berbagai terminologi tersebut hampir tidak berani keluar dari mainstream perang.¹⁵ Pada bulan Juli 2012, Suriah mengakui secara terbuka bahwa ia memiliki senjata kimia. Selama beberapa tahun sebelumnya pengumuman ini, komunitas intelijen Amerika Serikat menilai bahwa Suriah memiliki cadangan senjata kimia, termasuk gas mustard, agen blister, dan agen saraf seperti sarin dan VX. Suriah juga memiliki kemampuan untuk memasukkan agen ini dengan menggunakan bom udara, rudal balistik, dan roket artileri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah Jihad Makdissi menegaskan bahwa Suriah memiliki senjata kimia, yang menyatakan bahwa senjata-senjata ini tidak akan pernah digunakan terhadap rakyat Suriah, namun hanya terhadap “agresi eksternal”.¹⁶ Pernyataan tidak akan digunakannya senjata kimia ini terhadap rakyat Suriah terbantahkan pada Desember 2012. Terdapat adanya penggunaan pertama senjata kimia dilaporkan. Tujuh orang diduga tewas di Homs oleh “gas beracun” yang digunakan oleh rezim Assad. Jangkauan termasuk laporan efek samping seperti mual, otot rileks, penglihatan kabur, dan kesulitan bernapas. Pasukan Assad menyerang kawasan yang dikuasai pemberontak al-Bayyada di kota Suriah barat dengan gas beracun yang mirip dengan sarin yang mematikan.¹⁷ Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri merupakan salah satu konflik kontemporer yang telah dijelaskan oleh Mary Kaldor.

Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB di Republik Arab Suriah menerbitkan laporan terbaru, yang mencakup periode 15 Januari - 15 Mei tahun 2013. Paragraf 139-140 berbunyi: Tuduhan telah diterima mengenai penggunaan senjata kimia oleh kedua belah pihak [dalam konflik di Suriah]. Perhatian mayoritas mereka digunakan oleh pasukan pemerintah. Dalam empat serangan - di Khan Al-Asal, Aleppo, 19 Maret 2013; Uteibah, Damaskus, 19 Maret 2013; lingkungan Sheikh Maqsood, Aleppo, 13 April 2013; dan Saraqib, Idlib, 29 April 2013. Ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa jumlah terbatas dari bahan kimia beracun telah digunakan. Ini belum mungkin pada bukti yang tersedia karena untuk menentukan bahan kimia yang tepat digunakan diperlukan sistem pengiriman oleh pelaku. Insiden lain juga tetap diselidiki termasuk temuan konklusif - terutama dengan tidak adanya serangan skala besar - mungkin dicapai melalui setelah dilakukannya pengujian sampel yang diambil langsung dari korban atau lokasi serangan dugaan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Panel Ahli, yang dipimpin oleh Profesor Sellström dan dirakit di bawah Mekanisme Sekretaris Jenderal untuk Investigasi Dugaan Penggunaan Senjata Kimia dan Biologi, diberikan akses penuh ke Suriah.¹⁸

Pemerintah Amerika Serikat telah memantau potensi penggunaan senjata kimia di Suriah. Berawal dari penilaian yang dibuat oleh komunitas intelijen Amerika Serikat pada bulan April 2013, Presiden AS mengarahkan komunitas intelijen untuk mencari informasi kredibel untuk membangun penilaian itu dan menetapkan fakta-fakta dengan beberapa kepastian. Penolakan pemerintah Suriah untuk memberikan akses ke PBB untuk menyelidiki setiap dan semua tuduhan penggunaan senjata kimia telah mencegah penyelidikan yang komprehensif dan kredibel seperti yang disebutkan oleh masyarakat internasional. Rezim Assad dapat membuktikan bahwa permintaan untuk penyelidikan bukan hanya taktik pengalihan dengan memberikan fakta misi pencari PBB akses langsung dan tak terkekang untuk melakukan investigasi di tempat untuk membantu mengungkapkan kebenaran tentang senjata kimia digunakan di Suriah. Sambil mendorong untuk penyelidikan PBB, Amerika Serikat juga telah bekerja segera dengan mitra dan sekutu serta individu di dalam wilayah Suriah, termasuk oposisi Suriah, untuk pengadaan, berbagi, dan mengevaluasi informasi yang terkait dengan laporan dari penggunaan senjata kimia. Komunitas intelijen Amerika Serikat juga menilai bahwa rezim Assad telah menggunakan senjata kimia, termasuk sarin agen saraf, dalam skala kecil terhadap oposisi beberapa kali dalam Mei 2012-Mei 2013. Komunitas intelijen AS memiliki keyakinan tinggi bahwa penilaian diberikan beberapa, aliran informasi yang independen. Komunitas intelijen memperkirakan bahwa 100 sampai 150 orang telah meninggal

akibat serangan senjata kimia terdeteksi di Suriah sampai Juni 2013.¹⁹ Penggunaan senjata kimia dalam suatu negara oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain merupakan salah satu indikator konflik kontemporer dimana konflik tidak hanya terfokus terhadap konflik dengan pihak luar, namun terdapat konflik dalam suatu negara.

Pada Agustus 2013 terjadi serangan senjata kimia di wilayah Damaskus. Pemerintah Amerika Serikat menilai dengan keyakinan tinggi bahwa pemerintah Suriah melakukan serangan senjata kimia di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa rezim menggunakan agen saraf dalam serangan itu. Penilaian semua sumber tersebut didasarkan pada sebuah lembaga besar dan sumber-sumber independen menunjukkan bahwa serangan senjata kimia berlangsung di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. Selain AS informasi intelijen, ada rekening dari tenaga medis internasional dan Suriah; video; laporan saksi; ribuan laporan media sosial dari setidaknya 12 lokasi yang berbeda di daerah Damaskus; rekening wartawan; dan laporan dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel. Sebuah penilaian awal pemerintah AS menetapkan bahwa 1.429 orang tewas dalam serangan senjata kimia, termasuk setidaknya 426 anak-anak.²⁰

Kejadian ini mengakibatkan Suriah setuju untuk menempatkan senjata kimia di bawah kendali internasional untuk membongkar senjata kimia dan Amerika Serikat setuju untuk tidak melakukan serangan militer terhadap negara itu. Suriah juga setuju untuk menyambut diskusi dengan Rusia. Presiden Barack Obama, Presiden Prancis Francois Hollande, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron membahas bagaimana melaksanakan rencana melalui Dewan Keamanan PBB, dengan Prancis mulai menyusun resolusi berdasarkan usulan Rusia, tetapi dengan ketentuan yang memaksa berwenang jika Assad gagal untuk melaksanakan ketentuan resolusi.²¹ Penggunaan senjata kimia sebagai senjata pemusnah massal yang dilarang penggunaannya telah diketahui oleh negara luar, membuat posisi pemerintah Suriah semakin terjepit untuk menerima secara sukarela melakukan perlucutan senjata kimia oleh organisasi internasional khusus yang menangani senjata kimia. Hal ini sesuai dengan konsep *disarmament* yang telah dijelaskan dalam buku *International Relations: The Key Concepts Second Edition* karya Martin Griffiths dan kawan-kawan.

Namun selain pemerintah Suriah, menurut Carla Del Ponte seorang peneliti HAM PBB independen telah mengumpulkan kesaksian dari korban perang sipil Suriah dan staf medis yang menunjukkan bahwa pasukan pemberontak telah menggunakan agen saraf yaitu gas sarin. Komisi penyelidikan yang independen PBB di Suriah belum melihat bukti dari pasukan pemerintah telah menggunakan senjata kimia, yang dilarang di bawah hukum internasional.²² Selain itu, pasukan IS (*Islamic States*) melakukan serangan langsung pada warga sipil serta serangan membabi buta. IS dilaporkan juga meluncurkan serangan kimia menggunakan agen klorin dan mustard. *Syrian American Medical Society* mengatakan bahwa stafnya melakukan perawatan kepada lebih dari 50 penduduk sipil dengan gejala yang menunjukkan paparan bahan kimia setelah pasukan ISIS menembak mortir dan artileri ke Marea, sebuah kota di Aleppo, pada tanggal 21 Agustus 2015. Satu bayi meninggal karena paparan. ISIS²³ merupakan salah satu aktor *non-state* yang semakin memperjelas bahwa konflik di wilayah Suriah ini merupakan konflik kontemporer.

4. Analisa Keterlibatan OPCW dalam Perlucutan Senjata Kimia pada Konflik Kontemporer di Suriah

Organization for Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) tidak berdiam diri melihat adanya penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer di Suriah. Sebagai organisasi internasional yang memiliki kewajiban melucuti senjata kimia dunia, salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia di Suriah yaitu membentuk tim *ad hoc* yang dinamakan *OPCW Fact Finding Mission* (FFM) pada 29 April 2014. Sebagai hasil dari penyelidikan pertama, FFM mengeluarkan tiga laporan pada tahun 2014 yang menyimpulkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa klorin telah digunakan dalam serangan terhadap tiga desa di Suriah utara. Direktur Jenderal OPCW Ahmet Uzumcu telah mengedarkan ke negara-negara pihak berupa tiga laporan yang disampaikan kepadanya oleh tim FFM. FFM telah bertugas untuk melihat ke dalam tiga bagian terpisah dari insiden di mana penggunaan bahan kimia beracun di Suriah telah dilaporkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Republik Arab Suriah bahwa tentaranya telah mengalami korban dari penggunaan bahan

kimia beracun, tim FFM melakukan tiga tim penyebaran ke Suriah. Tim ini telah mengeluarkan laporan sementara yang detail analisis dari insiden dilaporkan terjadi di Jobar pada 29 Agustus 2015. Berdasarkan bukti yang tersedia mengenai insiden ini, FFM tidak bisa percaya diri menentukan bahwa bahan kimia yang digunakan sebagai senjata.²⁴

Tim FFM kedua menyelidiki tuduhan penggunaan bahan kimia beracun pada periode Maret-Mei tahun 2015 dalam provinsi Idlib Suriah yang mengakibatkan kematian enam orang. Berdasarkan analisis informasi dan bukti yang tersedia untuk itu, FFM menyimpulkan bahwa dugaan insiden kemungkinan melibatkan penggunaan satu atau lebih bahan kimia beracun dan adanya kemungkinan mengandung unsur klorin sebagai senjata. OPCW FFM juga telah menyelidiki insiden ketiga yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015 di mana aktor non-negara diduga menggunakan senjata kimia di kota Marea, dekat dengan Aleppo. FFM mengumpulkan sampel dan mewawancarai dua individu yang terkena paparan, dan mengobati staf medis. Dalam hal ini, tim mampu mengkonfirmasi dengan sangat percaya diri bahwa setidaknya dua orang terkena mustard sulfur dan sedang dalam proses pemulihan dari paparan. Hal ini sangat mungkin bahwa efek mustard belerang mengakibatkan kematian bayi. Dewan Eksekutif OPCW dan Dewan Keamanan PBB telah menyatakan dukungan untuk pekerjaan FFM, dan telah menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memperpanjang kerja sama penuh kedua lembaga ini untuk misi dan memastikan bahwa bekerja dengan aman dan efektif.

Keterlibatan OPCW dalam konsep *disarmament* baru²⁵ ini tetap memberikan hasil yang tidak berbeda dari sebelumnya dimana senjata kimia tetap digunakan dalam konflik Suriah walaupun pemerintah Suriah telah menyatakan negaranya bebas dari bahan-bahan senjata kimia. Alasan yang membuat OPCW tidak mampu menanggulangi bebasnya senjata kimia di Suriah yaitu OPCW tidak berhak menentukan pelaku pemakai senjata kimia dan bahan-bahan kimia sangat mudah didapat di kalangan sipil untuk dijadikan senjata. OPCW sebagai organisasi internasional yang berawal perjanjian KSK dalam mampu memasuki negara untuk memberikan keamanan terhadap warga dalam negara Suriah yang terancam oleh senjata kimia dengan membuat pemerintah Suriah menandatangani dan meratifikasi perjanjian KSK sebagai syarat dalam perlucutan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri mencerminkan adanya gangguan terhadap *human security* (keamanan manusia) oleh penggunaan senjata kimia. Hal ini sesuai dengan pendekatan “baru” konsep *disarmament* yang dijelaskan oleh John Borrie dan Vanessa Martin Randin.

OPCW menekankan pada pendekatan tradisional dalam proses negosiasi akan keinginan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan OPCW. Keinginan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan OPCW lebih dititikberatkan hasil diplomasi pemerintah Rusia dan pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Suriah dengan hasil kesepakatan yang dirahasiakan. Seharusnya OPCW sebagai organisasi besar berperan sebagai aktor dominan dalam proses negosiasi untuk melucuti senjata kimia pemerintah Suriah dan juga diberikan kewenangan untuk mencari pelaku pengguna senjata kimia bukan hanya memastikan penggunaan senjata kimia sesuai dengan konsep *disarmament* dengan pendekatan *dekonstruksionisme*. Pendekatan yang digunakan dalam perlucutan senjata kimia mayoritas pada indikator pendekatan “tradisional” sehingga belum efektif bila diterapkan pada konflik kontemporer.

OPCW sesuai dengan pasal-pasal KSK yang digunakannya dalam beroperasi sangat birokratis hal ini sesuai dengan setiap pasal dimana negara tetap sebagai entitas tertinggi dalam melakukan perlucutan senjata kimia. Seharusnya sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada bab pertama, OPCW harus lebih cepat dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia dengan menggunakan pendekatan kontemporer dalam *disarmament*. Pemerintah Suriah yang resmi bergabung dengan OPCW pada September 2013, menjalani proses perlucutan senjata berjalan lambat dengan baru menyatakan Suriah bebas senjata kimia pada Januari 2016, dan itupun ternyata masih ada penggunaan senjata kimia oleh aktor non-state dengan rentang waktu tahun 2014 di saat proses perlucutan senjata sedang berlangsung hingga Juli 2016 setelah perlucutan senjata tercapai. Maka dari itu, OPCW harus diberikan kewenangan lebih dengan bersifat independen dalam melaksanakan tugas pelucutan senjata kimia tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Selain itu, OPCW juga harus selalu memperbaharui senyawa kimia yang tidak boleh beredar di lingkungan sipil dan memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran senyawa kimia di berbagai belahan dunia khususnya pada zona wilayah yang sedang berkonflik dan mampu menyatakan aktor penggunaan senjata kimia secara transparan dan dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya intervensi kepentingan politik negara tertentu.

5. Kesimpulan

Upaya *disarmament* (perlucutan senjata) dilakukan oleh berbagai pihak agar senjata kimia tersebut tidak digunakan oleh pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah yang mengakui memiliki senjata kimia bersedia untuk dilucuti. Perlucutan senjata kimia Suriah ini dilakukan berdasarkan keinginan Rusia dan AS untuk melucuti senjata kimia Suriah melalui diskusi kedua negara ini. Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan bahwa rezim Assad menyambut diskusi terkait penyerahan senjata kimia Suriah dan bergabung dengan KSK (Konvensi Senjata Kimia) hingga akhirnya pemerintah Suriah sepakat menandatangani dan meratifikasi KSK, Dewan Eksekutif OPCW mengadopsi susunan waktu untuk penghancuran senjata kimia Suriah. Waktu²⁶ bersamaan pula, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan untuk mengadopsi sebuah resolusi yang mendukung susunan waktu OPCW untuk menghancurkan gudang senjata kimia Suriah. Resolusi Dewan Keamanan mengatakan bahwa lembaga tersebut akan memberlakukan langkah-langkah di bawah bab 7 dari Piagam PBB jika Suriah tidak mematuhi resolusi, dan memiliki serta menggunakan wewenangnya untuk mentransfer setiap bahan kimia.

OPCW menyatakan senjata kimia yang dideklarasikan oleh pemerintah Suriah telah 100% dihancurkan pada awal Januari 2016. Walaupun berhasil, terdapat penggunaan senjata kimia pada rentang waktu Mei 2014-Juli 2016 oleh aktor *non-state* khususnya oleh kelompok teroris yang diberitakan oleh berbagai media. Hal ini diperkuat oleh sumber resmi seperti dari laporan PBB dan Pemerintah Amerika Serikat serta OPCW yang termasuk tim independen *Fact Finding Mission* (FFM) OPCW dengan didukung tim gabungan *Joint Investigation Mechanism* (JIM) OPCW-UN tidak bisa menyebutkan pelaku penggunaan senjata kimia oleh aktor *non-state* walaupun dipastikan adanya penggunaan senjata kimia oleh aktor *non-state* di Suriah. Kedua tim ini hanya memastikan adanya penggunaan senjata kimia di Suriah di saat perlucutan senjata kimia sedang dilakukan dan perlucutan senjata kimia sudah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai upaya OPCW telah dilakukan agar mampu melakukan perlucutan senjata kimia milik aktor *non-state*, namun perlucutan senjata kimia pemerintah Suriah tidak dilakukan bersamaan dengan perlucutan senjata kimia yang digunakan oleh aktor *non-state*. Keterlibatan OPCW sebagai organisasi internasional dalam melucuti senjata kimia oleh teroris IS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah Suriah memiliki keterbatasan dalam beroperasi. Maka dari itu, OPCW sebagai organisasi internasional yang berlandaskan pada KSK dalam perlucutan senjata kimia dunia membutuhkan kewenangan lebih besar dan keluwesan dalam beroperasi.

Daftar Pustaka

- ¹ Tim Sweijs and Jaakko Kooroshy, (2010), *The Future of CBRN*, Hague:The Hague Centre for Strategic Studies, hal. 9
- ² M. Zuhair Diab, (1997), "Syria's Chemical and Biological Weapons: Assessing Capabilities and Motivations," *The Nonproliferation Review* 5, hal. 107.
- ³ NPR.org, Tom Bowman, (9 Maret 2016), *U.S. Hopes ISIS Prisoner Will Lead Americans To Chemical Weapons*, <http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/03/09/469842162/u-s-hopes-isis-prisoner-will-lead-americans-to-chemical-weapons> diakses pada 10 Juli 2016
- ⁴ Ramesh Takur dan Ere Haru, (2006), *The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities*, Hongkong:United Nations University Press, hal. 1
- ⁵ OPCW.UNMission.org, *About OPCW-UN Joint Mission: Background*, <http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx> diakses pada 20 Juni 2016
- ⁶ OPCW.org, (10 Desember 2013), *Nobel Peace Prize 2013 received by OPCW Director-General: "Working Together for a World Free of Chemical Weapons, and Beyond"*, <https://www.opcw.org/news/article/nobel-peace-prize-2013-received-by-opcw-director-general-working-together-for-a-world-free-of-ch/> diakses pada 10 Juli 2016

- ⁷ NPR.org, Tom Bowman, (9 Maret 2016), U.S. Hopes ISIS Prisoner Will Lead Americans To Chemical Weapons, <http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/03/09/469842162/u-s-hopes-isis-prisoner-will-lead-americans-to-chemical-weapons> diakses pada 10 Juli 2016
- ⁸ Teuku May Rudy, (2009), *Administrasi dan Organisasi internasional*, Bandung: Angkasa, hal. 2
- ⁹ Akira Iriye, (2002), *Global Community: The Role of International Organization in the Making of the Contemporary World*, London: University of California Press, hal. 3
- ¹⁰ DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochammad Yani, (2005), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hal 91-92
- ¹¹ Rumki Basu, (2012), *International Politics: Concepts, Theories, and Issues*, New Delhi: SAGE Publication, hal. 125
- ¹² Hans J. Morgenthau, (1965), *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 4th edition, New York: Alfred A. Knopf, hal. 375
- ¹³ UNDDR.org, *What is DDR?*, http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx diakses pada 12 Juli 2016
- ¹⁴ John Borrie dan Vanessa Martin Randin, (2005), *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*, UN: UNIDIR, hal. 54-55
- ¹⁵ Hugh Mial dkk, (1999), *Contemporary Conflicts Resolution*, Cambridge & Oxford: Polity Press, hal. 60
- ¹⁶ UN.org, (23 Juli 2012), *Use of chemical weapons in Syria would be 'reprehensible' – UN chief*, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42538#.V3LqFV4Ta9U> diakses pada 29 Juni 2016
- ¹⁷ Newyorker.com, Raffi Khatchadourian, (16 Januari 2013), *The Case of Agent 15: Did Syria Use a Nerve Agent?*, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-case-of-agent-15-did-syria-use-a-nerve-agent> diakses pada 29 Juni 2016
- ¹⁸ UN Human Rights Council, 23rd session, “*Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*”, advance unedited version, UN document A/HRC/23/58, tertanggal 4 Juni 2013 hal.21
- ¹⁹ WHITEHOUSE.gov, Office of Press Secretary, (13 Juni 2013), *Statement by Deputy National Security Advisor for Strategic Communications Ben Rhodes on Syrian Chemical Weapons Use*, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communications-ben-> diakses pada 29 Juni 2016
- ²⁰ WHITEHOUSE.gov, Office of Press Secretary, (30 Agustus 2013), *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21, 2013*, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 14 Juni 2016
- ²¹ Armscontrol.org, Yuta Kawashima, (Mei 2015), *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> diakses pada 15 Juni 2016
- ²² BBC.com, (6 Mei 2013), *UN's Del Ponte says evidence Syria rebels 'used sarin'*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188> diakses pada 17 Juni 2016
- ²³ Amnesty.org, *Syria 2015/2016* <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/> diakses pada 29 Juni 2016
- ²⁴ OPCW.org, (6 November 2015), *Director-General circulates OPCW FFM Reports to States Parties*, <https://www.opcw.org/news/article/director-general-circulates-opcw-ffm-reports-to-states-parties/> diakses pada 21 Juni 2016
- ²⁵ John Borrie dan Vanessa Martin Randin, (2005), *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*, UN: UNIDIR, hal. 54-55